



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 3 Tahun 2024 Page 15528-15541

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Determinan Partisipasi Masyarakat dalam Program Keluarga Berencana (KB) di Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar

Kadek Raditya Dewanta^{1✉}, I Nyoman Mahaendra Yasa²

Universitas Udayana

Email: kadekraditya03@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Penelitian ini menganalisis pengaruh tingkat pendidikan, umur, pendapatan keluarga dan intervensi pemerintah terhadap partisipasi masyarakat dalam program KB di Kecamatan Denpasar Selatan Tahun 2022. Tujuan utama penelitian ini adalah menganalisis pengaruh, tingkat pendidikan, umur, pendapatan keluarga dan intervensi pemerintah secara simultan dan parsial serta menganalisis intervensi pemerintah dalam memoderasi tingkat pendidikan terhadap partisipasi masyarakat dalam program KB di Kecamatan Denpasar Selatan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu dengan melakukan wawancara terstruktur kepada responden. Populasi penelitian yaitu seluruh pasangan usia subur yang berpartisipasi dalam program KB di Kecamatan Denpasar Selatan yang berjumlah 19.412 orang. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling. Dalam penelitian ini, jumlah sampel yang ditentukan akan diteliti sebanyak 100 perempuan dengan status kawin yang berpartisipasi dalam program KB aktif dengan teknik Moderated Regression Analysis. Berdasarkan analisis diperoleh hasil bahwa tingkat pendidikan, umur, pendapatan keluarga dan intervensi pemerintah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap partisipasi masyarakat dalam program KB. Tingkat pendidikan, umur, pendapatan keluarga dan intervensi pemerintah secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap partisipasi masyarakat dalam program KB di Kecamatan Denpasar Selatan. Intervensi pemerintah memoderasi secara semu pengaruh positif tingkat pendidikan terhadap partisipasi masyarakat dalam program KB di Kecamatan Denpasar Selatan. Hasil penelitian ini memiliki implikasi bahwa Intervensi pemerintah merupakan indikator penting dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program KB. Intervensi pemerintah yang efektif dapat mempengaruhi dan memoderasi hubungan antara faktor-faktor lain, seperti tingkat pendidikan, umur, dan pendapatan keluarga, terhadap partisipasi masyarakat dalam program keluarga berencana. Perlunya dukungan pemerintah yang kuat, kebijakan yang berkelanjutan, dan alokasi sumber daya yang memadai untuk

memfasilitasi dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program KB.

Kata Kunci: *Tingkat Pendidikan, Umur, Pendapatan Keluarga, Intervensi Pemerintah, Partisipasi Masyarakat dalam Program KB*

Abstract

This research analyzes the influence of education level, age, family income and government intervention on community participation in the family planning program in South Denpasar District in 2022. The main aim of this research is to analyze the influence of education level, age, family income and government intervention simultaneously and partially as well as analyzing government intervention in moderating the level of education on community participation in family planning programs in South Denpasar District. The data used in this research is primary data, namely by conducting structured interviews with respondents. The research population was all couples of childbearing age who participated in the family planning program in South Denpasar District, totaling 19,412 people. The sampling method used was purposive sampling. In this research, the number of samples determined to be studied was 100 women with married status who participated in an active family planning program using the Moderated Regression Analysis technique. Based on the analysis, the results showed that education level, age, family income and government intervention simultaneously had a significant effect on community participation in family planning programs. Education level, age, family income and government intervention partially have a positive and significant effect on community participation in the family planning program in South Denpasar District. Government intervention partially moderates the positive influence of education level on community participation in family planning programs in South Denpasar District. The results of this research have the implication that government intervention is an important indicator in increasing community participation in family planning programs. Effective government intervention can influence and moderate the relationship between other factors, such as education level, age, and family income, on community participation in family planning programs. The need for strong government support, sustainable policies, and adequate resource allocation to facilitate and increase community participation in family planning programs.

Keywords: *Education Level, Age, Family Income, Government Intervention, Community Participation In Family Planning Programs*

PENDAHULUAN

Kota Denpasar adalah ibu kota Provinsi Bali dan memiliki kepadatan penduduk tertinggi dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Bali. Urbanisasi dan kepadatan penduduk tinggi bisa menyebabkan aksesibilitas terhadap layanan kesehatan dan informasi tentang KB menjadi lebih sulit. Penyelenggaraan program KB di Kota Denpasar dapat memerlukan strategi yang disesuaikan dengan karakteristik kepadatan

penduduk dan kebutuhan lokal. Faktor-faktor seperti tingkat pendidikan, pengetahuan tentang KB, dan dukungan pemerintah setempat juga bisa menjadi penentu dalam partisipasi masyarakat dalam program tersebut. Faktor ini dapat mempengaruhi partisipasi dalam program KB. Secara lengkap jumlah peserta KB dan pasangan usia subur menurut kecamatan di Kota Denpasar seperti pada Tabel 1.3.

Tabel 1. Jumlah Peserta KB Aktif dan Pasangan Usia Subur Menurut Kecamatan di Kota Denpasar Tahun 2022

No.	Kecamatan	Pasangan Usia Subur (Pasang)	Peserta KB Aktif (CU)	CU/PUS (%)
1.	Denpasar Selatan	19.412	7.386	38,05
2.	Denpasar Timur	12.201	5.925	48,56
3.	Denpasar Barat	16.859	7.117	42,21
4.	Denpasar Utara	17.252	7.753	44,93
	Kota Denpasar	65.724	28.181	42,87

Sumber: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Bali, 2023

Berdasarkan Tabel 1 menurut data dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Bali 2023, Kota Denpasar terdiri dari 4 kecamatan dapat dikatakan terdapat variasi dalam jumlah pasangan usia subur dan peserta KB aktif antar kecamatan di Kota Denpasar pada tahun 2022. Kecamatan Denpasar Selatan memiliki persentase peserta KB dan jumlah PUS dalam Program KB yang relatif rendah, yaitu sebesar 38,05 persen. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar pasangan usia subur (PUS) di kecamatan tersebut belum aktif dalam program KB. Meskipun Kecamatan Denpasar Selatan memiliki jumlah PUS yang relatif lebih tinggi dibandingkan beberapa kecamatan lain di Kota Denpasar, hal ini tidak selalu mencerminkan tingkat partisipasi yang tinggi. Potensi partisipasi dalam program KB dapat dipengaruhi oleh sejauh mana masyarakat mengetahui dan memahami program tersebut. Jumlah PUS yang signifikan memberikan peluang besar untuk mencapai dampak positif jika partisipasi dapat ditingkatkan.

Keberhasilan Program KB tidak lepas dari intervensi pemerintah, dalam hal ini Pemerintah pusat mengintervensi dengan membuat kebijakan KB mengacu kepada Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, pasal 78 yang menyatakan program pelayanan KB mengatur kehamilan pasangan usia subur guna membangun generasi penerus yang sehat dan cerdas. Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga yang menyatakan bahwa

Kebijakan KB dilaksanakan untuk membantu calon atau pasangan suami istri dalam mengambil keputusan dan mewujudkan hak reproduksi secara bertanggung jawab. Pemerintah melalui Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) terus berupaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program KB. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, BKKBN memilih tanggung jawab dalam menyelenggarakan komunikasi, informasi dan edukasi dibidang Kependudukan dan Keluarga Berencana (KKB) kepada seluruh lapisan masyarakat, khususnya pasangan usia subur (PUS) (BKKBN, 2020). Tidak hanya untuk perempuan, pemerintah juga berupaya melibatkan laki-laki dalam program KB. Pemerintah bertanggung jawab menjamin penyediaan pelayanan KB yang aman dan bermutu sesuai standar profesi dan etik yang dapat menjangkau dan terjangkau bagi masyarakat. Pemerintah juga menyediakan dana dan sumber daya untuk kegiatan penyuluhan dan edukasi yang ditujukan kepada masyarakat melibatkan penyediaan informasi yang jelas tentang manfaat keluarga berencana, metode yang tersedia, dan cara penggunaannya. Pemerintah bisa memberikan insentif kepada masyarakat yang aktif berpartisipasi dalam program keluarga berencana, seperti program insentif finansial atau pemberian hadiah.

Memperhatikan tingginya tingkat jumlah penduduk, kepadatan penduduk dan rendahnya Partisipasi masyarakat di Kecamatan Denpasar Selatan dalam program Keluarga Berencana, maka dipandang mendesak untuk melakukan penelitian tentang determinan partisipasi masyarakat dalam program KB di Kecamatan Denpasar Selatan.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian kuantitatif yang berbentuk asosiatif Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu dengan melakukan wawancara terstruktur kepada responden. Populasi penelitian yaitu seluruh pasangan usia subur yang berpartisipasi dalam program KB di Kecamatan Denpasar Selatan yang berjumlah 19.412 orang. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*. Dalam penelitian ini, jumlah sampel yang ditentukan akan diteliti sebanyak 100 perempuan dengan status kawin yang berpartisipasi dalam program KB aktif dengan teknik *Moderated Regression Analysis*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaruh Tingkat Pendidikan, Umur, Pendapatan Keluarga, dan Intervensi Pemerintah Secara Simultan terhadap Partisipasi Masyarakat dalam Program KB di Kecamatan Denpasar Selatan.

Berdasarkan hasil pengolahan data dapat diketahui bahwa tingkat pendidikan, umur, pendapatan keluarga, dan intervensi pemerintah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap partisipasi masyarakat dalam program KB di Kecamatan Denpasar Selatan. Hasil penelitian mengindikasikan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin dewasa umur, semakin tinggi pendapatan keluarga dan tingginya intervensi pemerintah maka partisipasi masyarakat dalam program KB di Kecamatan Denpasar Selatan semakin meningkat.

Latar belakang pendidikan yang tinggi dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam keikutsertaan penyelenggaraan program KB, karena jika tingkat pendidikan masyarakat tinggi maka kebanyakan masyarakat tidak memutuskan untuk menikah muda melainkan bekerja terlebih dahulu

Hasil penelitian ini sejalan dengan Niken *et al.* (2015) bahwa tingkat pendidikan masyarakat berpengaruh positif pada partisipasi dalam program KB. Dalam hal ini, semakin tinggi tingkat Pendidikan masyarakat maka secara tidak langsung masyarakat akan mengerti tentang kesejahteraan keluarga dalam menciptakan keluarga kecil bahagia dan berkualitas. Hasil penelitian lain yang serupa ditunjukkan oleh Marhaeni dan Dyastari Saskara (2015) bahwa tingkat pendidikan berpengaruh positif terhadap keinginan seseorang dan pasangan untuk menentukan jumlah anak.

Umur berpengaruh terhadap partisipasi dalam program KB. seiring bertambahnya umur seseorang maka individu tersebut memiliki tingkat kematangan yang lebih besar dalam pengambilan keputusan. Hal Ini dapat mempengaruhi kemampuan mereka untuk merencanakan dan membuat keputusan terkait partisipasi dalam program KB secara rasional.

Hasil penelitian ini sejalan dengan Sri *et al.* (2016) umur rata-rata responden yang tidak ikut Program KB di Desa Sungai Kuning adalah termasuk dalam kategori lanjut usia, dimana usia responden yang tidak ikut Program KB adalah berusia diatas 50 tahun. Usia merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi persepsi PUS tidak ikut KB, sesuai hasil wawancara yang dilakukan dengan responden mengatakan jika dengan kondisi umur yang sudah dikategorikan lanjut usia, tetap dipaksakan untuk ikut Program KB maka akan berdampak buruk bagi kesehatan.

Pendapatan keluarga berpengaruh positif dan signifikan terhadap partisipasi masyarakat dalam program KB. Pendapatan keluarga yang lebih tinggi dapat meningkatkan akses terhadap layanan kesehatan, termasuk layanan terkait program KB. Dalam konteks teori kesejahteraan, partisipasi dalam program KB dapat dianggap sebagai investasi dalam kesejahteraan jangka panjang keluarga. Pendapatan tinggi dapat memfasilitasi keluarga untuk melihat perencanaan keluarga sebagai suatu investasi yang berkontribusi pada kesejahteraan dan keberlanjutan. Menurut teori kesejahteraan bahwa pendapatan keluarga berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat dalam program KB. Dalam hal ini Pendapatan keluarga yang lebih tinggi dapat meningkatkan akses terhadap layanan kesehatan, termasuk layanan terkait program KB.

Hasil penelitian ini sejalan dengan Nurandini (2015) yang menyebutkan apabila terjadi peningkatan pendapatan maka seseorang akan semakin lama berpartisipasi terhadap program KB, begitu pula sebaliknya jika terjadi penurunan pendapatan maka seseorang akan sebentar berpartisipasi terhadap program KB. Dalam artian pendapatan mempengaruhi seseorang dalam mengikuti program keluarga berencana (KB). Menurut Penelitian yang ditulis oleh Rahmayanti (2022) menyatakan bahwa pendapatan keluarga berpengaruh positif terhadap partisipasi masyarakat dalam program keluarga berencana. Penelitian yang dilakukan oleh Maiharti (2017) menyatakan bahwa keluarga pada tingkat penghasilan tinggi akan lebih mudah menerima serta mengikuti program ini dan akan memilih metode kontrasepsi yang efektif. Sebaliknya keluarga dengan penghasilan rendah akan sangat sulit ikut dalam program KB karena pada program KB, akseptor menanggung sendiri biaya yang dikenakan bila dia menggunakan salah satu alat kontrasepsi.

Intervensi pemerintah mencakup perancangan kebijakan dan program yang mendukung partisipasi masyarakat dalam program KB. Pemerintah melakukan intervensi dengan merancang kebijakan yang memberikan insentif, informasi, dan layanan yang memudahkan akses masyarakat baik dengan tingkat pendidikan rendah maupun masyarakat dengan tingkat pendidikan tinggi terhadap program KB.

Sejalan dengan hasil penelitian Sumayasa, I. N. *et al.* (2015) menunjukkan bahwa intervensi pemerintah Indonesia berperan penting dalam sektor pendidikan. Pemerintah mengalokasikan 20 persen dari APBN untuk menyukseskan pendidikan Nasional dan membangun SDM yang berkualitas. Peningkatan investasi pemerintah dalam bidang pendidikan telah memberikan dampak positif terhadap partisipasi masyarakat dalam program keluarga berencana (KB). Dalam hal ini Pemerintah melihat SDM yang berkualitas sebagai faktor kunci dalam berhasilnya program KB. Peningkatan tingkat pendidikan

diharapkan dapat menciptakan SDM yang lebih sadar, terinformasi, dan dapat berpartisipasi aktif dalam program KB. Menurut penelitian Kunia Putra & Susilo (2018) menunjukkan bahwa intervensi pemerintah berperan penting dalam pendewasaan usia perkawinan Suku Tengger Ngadisari, hingga tidak lagi terjadi kasus pernikahan dini. Artinya Intervensi Pemerintah diduga memiliki peran kunci dalam mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menunda perkawinan hingga usia yang lebih matang dan sesuai dengan hukum yang berlaku. pemerintah terlibat dalam program pemerataan pendidikan atau kampanye sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang risiko pernikahan dini, baik dari segi kesehatan, sosial, maupun ekonomi. hasil penelitian pendewasaan usia perkawinan seharusnya tidak hanya sebuah kebijakan yang dikeluarkan karena kepentingan tertentu, melainkan juga harus dirumuskan berdasarkan kearifan lokal yang dimiliki oleh masyarakat.

Pengaruh Tingkat Pendidikan, Umur, Pendapatan Keluarga, Dan Intervensi Pemerintah Secara Parsial Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Program KB Di Kecamatan Denpasar Selatan

1. Pengaruh tingkat pendidikan secara parsial terhadap partisipasi masyarakat dalam program KB di Kecamatan Denpasar Selatan.

Berdasarkan Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pendidikan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap partisipasi masyarakat dalam program KB di Kecamatan Denpasar Selatan. Hal ini berarti bahwa apabila semakin tinggi tingkat pendidikan masyarakat maka semakin tinggi pula partisipasi masyarakat dalam program KB. Tingkat pendidikan yang lebih tinggi dapat meningkatkan kesadaran individu tentang pentingnya perencanaan keluarga dan kesehatan reproduksi. Individu dengan pendidikan yang lebih tinggi lebih menyadari dampak negatif dari kehamilan yang tidak direncanakan dan pentingnya menjaga kesehatan reproduksi.

Hasil analisis ini diperkuat oleh teori modal manusia bahwa pendidikan merupakan salah satu bentuk investasi dalam modal manusia yang dapat memberikan pengembalian positif (Todaro, 2015; 365-366). Tingkat pendidikan berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat dalam program KB. Tingkat pendidikan yang lebih tinggi cenderung meningkatkan akses seseorang terhadap informasi dan pengetahuan tentang program Keluarga Berencana. Seseorang yang lebih teredukasi lebih mampu memahami manfaat, risiko, dan prosedur terkait program KB, dengan

tingkat pendidikan yang lebih tinggi dapat meningkatkan keterlibatan aktif seseorang dalam pengambilan keputusan terkait partisipasi dalam program KB.

Hal ini sejalan dengan penelitian Marhaeni dan Saskara (2015); Sharma *et al.* (2018); Warni *et al.* (2020); Pancawati *et al.* (2020) yang menunjukkan bahwa tingkat pendidikan berhubungan positif dan signifikan terhadap partisipasi masyarakat dalam program KB.

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa tingkat pendidikan responden yaitu pada tingkat pendidikan SMA/SMK kebawah sebesar 85 persen. Hal ini menunjukkan bahwa responden dalam penelitian ini belum tentu memiliki pengetahuan yang baik, sehingga tentunya akan mempengaruhi keputusannya untuk berpartisipasi dalam program KB.

Tingkat pendidikan yang tinggi memberikan akses yang lebih baik terhadap informasi dan pengetahuan tentang pentingnya perencanaan keluarga. Individu dengan pendidikan tinggi lebih cenderung memiliki pemahaman yang lebih baik tentang konsekuensi dari pertumbuhan populasi yang cepat, termasuk dampaknya terhadap kesehatan ibu dan anak, ekonomi keluarga, dan kualitas hidup secara keseluruhan sehingga mampu memahami berbagai metode kontrasepsi yang tersedia dan memilih yang paling sesuai dengan kebutuhan mereka.

2. Pengaruh Umur Secara Parsial terhadap Partisipasi Masyarakat dalam Program KB di Kecamatan Denpasar Selatan.

Berdasarkan Hasil penelitian menunjukkan bahwa umur berpengaruh positif dan signifikan terhadap partisipasi masyarakat dalam program KB di Kecamatan Denpasar Selatan. Hal ini berarti bahwa semakin dewasa umur pasangan usia subur maka semakin tinggi partisipasi pula partisipasi mereka terhadap program KB.

Hasil analisis ini diperkuat oleh teori pilihan rasional bahwa tindakan perseorangan mengarah pada suatu tujuan dan tujuan tersebut adalah tindakan yang ditentukan oleh nilai atau preferensi (pilihan). Umur berpengaruh terhadap partisipasi dalam program KB. seiring bertambahnya umur seseorang maka individu tersebut memiliki tingkat kematangan yang lebih besar dalam pengambilan keputusan. Hal Ini dapat mempengaruhi kemampuan mereka untuk merencanakan dan membuat keputusan terkait partisipasi dalam program KB secara rasional. Dalam konteks teori pilihan rasional, keputusan untuk berpartisipasi dapat dipengaruhi oleh penilaian rasional terhadap risiko dan manfaat yang terkait.

Hal ini sejalan dengan penelitian Sulistyono (2014); Sri *et al.* (2016); Rahmawati (2021) yang mendapatkan hasil bahwa variabel umur mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap partisipasi masyarakat dalam program KB. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa umur rata-rata responden yang berpartisipasi dalam Program KB per desa dan kelurahan di Kecamatan Denpasar Selatan pada rentang usia 15-49 tahun termasuk dalam kategori usia produktif, sedangkan usia responden yang tidak berpartisipasi dalam Program KB adalah berusia di atas 50 tahun atau non produktif. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat yang berusia di bawah 50 tahun cenderung lebih aktif dalam Program KB, sementara mereka yang berusia di atas 50 tahun kurang cenderung untuk berpartisipasi. Masyarakat yang berusia di bawah 50 tahun termasuk dalam kategori usia produktif, lebih terbuka terhadap ide perencanaan keluarga karena masih dalam tahap reproduktif aktif dan lebih sadar akan manfaat dari mengontrol jumlah anak dan jarak kelahiran demi kesejahteraan keluarga sedangkan masyarakat yang berusia di atas 50 tahun memiliki jumlah anak yang sudah memadai atau telah melewati masa subur, sehingga mereka merasa tidak perlu lagi untuk mengikuti Program KB. Usia merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi persepsi PUS tidak ikut KB, sesuai hasil wawancara yang dilakukan dengan responden mengatakan jika dengan kondisi umur yang sudah dikategorikan lanjut usia, tetap dipaksakan untuk ikut Program KB maka akan berdampak buruk bagi kesehatan.

3. Pengaruh pendapatan keluarga secara parsial terhadap partisipasi masyarakat dalam program KB di Kecamatan Denpasar Selatan.

Berdasarkan Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan keluarga secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap partisipasi masyarakat dalam program KB. Hasil penelitian tersebut mengindikasikan bahwa semakin tinggi pendapatan keluarga maka semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam program KB. Pendapatan keluarga yang tinggi memberikan akses yang lebih baik terhadap sumber daya dan layanan kesehatan reproduksi. Pasangan dengan pendapatan yang cukup cenderung memiliki kemampuan finansial untuk membeli metode kontrasepsi yang efektif dan berkualitas, serta untuk mengakses layanan kesehatan terkait program KB. Mereka dapat memilih opsi kontrasepsi yang sesuai dengan kebutuhan mereka dan secara teratur memperoleh pasokan yang diperlukan. Dalam hal ini, tingkat pendapatan tinggi berperan dalam memfasilitasi partisipasi aktif dalam program KB.

Hal ini diperkuat oleh teori kesejahteraan bahwa pendapatan keluarga berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat dalam program KB. Dalam hal ini, partisipasi dalam program KB dapat dianggap sebagai investasi dalam kesejahteraan jangka panjang keluarga. Pendapatan tinggi dapat memfasilitasi keluarga untuk melihat perencanaan keluarga sebagai suatu investasi yang berkontribusi pada kesejahteraan dan keberlanjutan.

Hal ini sejalan dengan penelitian Nurandini (2015); Maiharti (2017); Notoadmojo (2017); Jarroh (2017) Rahmayanti (2022) yang menunjukkan bahwa pendapatan keluarga berhubungan positif dan signifikan terhadap partisipasi masyarakat dalam program KB. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa mayoritas pendapatan keluarga responden yaitu sebesar Rp4.000.001 – Rp6.000.000. Hal ini menunjukkan bahwa responden dalam penelitian ini telah memiliki pendapatan keluarga yang layak, sehingga tentunya telah memutuskan berpartisipasi dalam program KB sesuai dengan tingkat kebutuhan yang diinginkan. Apabila terjadi peningkatan pendapatan maka seseorang akan semakin lama berpartisipasi terhadap program KB, begitu pula sebaliknya jika terjadi penurunan pendapatan maka seseorang akan sebentar berpartisipasi terhadap program. Dalam artian pendapatan mempengaruhi seseorang dalam mengikuti program keluarga berencana (KB). Keluarga pada tingkat penghasilan tinggi akan lebih mudah menerima serta mengikuti program ini dan akan memilih metode kontrasepsi yang efektif. Sebaliknya keluarga dengan penghasilan rendah akan sangat sulit ikut dalam program KB karena pada program KB, akseptor menanggung sendiri biaya yang dikenakan bila dia menggunakan salah satu alat kontrasepsi.

4. Pengaruh intervensi pemerintah secara parsial terhadap partisipasi masyarakat dalam program KB di Kecamatan Denpasar Selatan.

Berdasarkan Hasil penelitian menunjukkan bahwa intervensi pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap partisipasi masyarakat dalam program KB. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi intervensi pemerintah maka semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam program KB.

Intervensi pemerintah yang tinggi dapat mencakup berbagai langkah, termasuk pengembangan kebijakan yang mendukung program KB, alokasi sumber daya yang memadai, pelaksanaan kampanye penyuluhan dan pendidikan, serta penyediaan akses yang mudah terhadap metode kontrasepsi dan layanan kesehatan reproduksi.

Dalam konteks ini, pemerintah Kecamatan Denpasar Selatan telah melakukan upaya yang signifikan untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam program KB.

Intervensi pemerintah yang kuat dapat meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang manfaat dan pentingnya perencanaan keluarga. Kampanye penyuluhan yang efektif dan program edukasi yang diselenggarakan oleh pemerintah dapat menginformasikan masyarakat tentang berbagai metode kontrasepsi yang tersedia, efektivitasnya, serta manfaatnya dalam menjaga kesehatan reproduksi dan meningkatkan kualitas hidup keluarga.

Hal ini diperkuat oleh teori kebijakan publik intervensi pemerintah memperkuat pengaruh tingkat pendidikan terhadap partisipasi masyarakat. Intervensi pemerintah mencakup perancangan kebijakan dan program yang mendukung partisipasi masyarakat dalam program KB. Pemerintah melakukan intervensi dengan merancang kebijakan yang memberikan insentif, informasi, dan layanan yang memudahkan akses masyarakat baik dengan tingkat pendidikan rendah maupun masyarakat dengan tingkat pendidikan tinggi terhadap program KB.

Hal ini sejalan dengan penelitian Sumayasa, I. N. *et al.* (2015); Schwandt *et al.* (2018); Kunia Putra & Susilo (2018); Oktavina (2020) menunjukkan bahwa intervensi pemerintah memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap partisipasi masyarakat dalam program KB.

Intervensi Pemerintah Indonesia berperan penting dalam sektor pendidikan. Pemerintah mengalokasikan 20 persen dari APBN untuk menyukseskan pendidikan Nasional dan membangun SDM yang berkualitas. Peningkatan investasi pemerintah dalam bidang pendidikan telah memberikan dampak positif terhadap partisipasi masyarakat dalam program keluarga berencana (KB). Dalam hal ini Pemerintah melihat SDM yang berkualitas sebagai faktor kunci dalam berhasilnya program KB. Peningkatan tingkat pendidikan diharapkan dapat menciptakan SDM yang lebih sadar, terinformasi, dan dapat berpartisipasi aktif dalam program KB.

Analisis Intervensi Pemerintah dalam Memoderasi Pengaruh Tingkat Pendidikan terhadap Partisipasi Masyarakat dalam Program KB di Kecamatan Denpasar Selatan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa intervensi pemerintah dapat memoderasi pengaruh positif tingkat pendidikan terhadap partisipasi masyarakat dalam program KB. Peran moderasi yang diperoleh adalah bersifat semu. Tingkat pendidikan yang tinggi umumnya dikaitkan dengan peningkatan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran

tentang kesehatan reproduksi dan pentingnya perencanaan keluarga. Individu dengan pendidikan yang lebih tinggi cenderung memiliki kemampuan kritis yang lebih baik dalam memahami informasi tentang program KB, serta mampu membuat keputusan yang lebih baik terkait dengan keluarga dan kesehatan reproduksi.

Intervensi pemerintah dapat melibatkan berbagai kebijakan, program, atau upaya yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program KB. Misalnya, pemerintah dapat menyediakan akses yang mudah terhadap informasi, layanan, dan metode kontrasepsi yang terjangkau di berbagai wilayah. Pemerintah juga dapat melaksanakan kampanye penyuluhan dan pendidikan yang ditujukan untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang program KB.

Dalam konteks ini, intervensi pemerintah dapat memperkuat efek positif pendidikan terhadap partisipasi masyarakat dalam program KB. Dengan demikian, intervensi pemerintah tidak hanya memfasilitasi akses dan pengetahuan, tetapi juga membantu mengatasi hambatan praktis, sosial, atau budaya yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam program KB. Intervensi yang tepat dapat meningkatkan efektivitas program KB dan memastikan bahwa manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat, termasuk mereka dengan tingkat pendidikan yang beragam.

Sejalan dengan teori kebijakan publik intervensi pemerintah memperkuat pengaruh tingkat pendidikan terhadap partisipasi masyarakat. Intervensi pemerintah mencakup perancangan kebijakan dan program yang mendukung partisipasi masyarakat dalam program KB. Pemerintah melakukan intervensi dengan merancang kebijakan yang memberikan insentif, informasi, dan layanan yang memudahkan akses masyarakat baik dengan tingkat pendidikan rendah maupun masyarakat dengan tingkat pendidikan tinggi terhadap program KB. Hasil penelitian ini sesuai dengan Sumayasa, I. N. *et al.* (2015) dan Schwandt *et al.* (2018).

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis yang telah diuraikan pada bab sebelumnya maka dapat ditarik simpulan untuk menjawab rumusan masalah sebagai berikut.

1. Tingkat pendidikan, umur, pendapatan keluarga, dan intervensi pemerintah berpengaruh secara simultan terhadap partisipasi masyarakat dalam program KB di Kecamatan Denpasar Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin dewasa umur pasangan usia subur, semakin tinggi pendapatan keluarga dan semakin tinggi intervensi pemerintah maka partisipasi

- masyarakat dalam program KB di Kecamatan Denpasar Selatan semakin meningkat.
2. Tingkat pendidikan, umur, pendapatan keluarga, dan intervensi pemerintah berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap partisipasi masyarakat dalam program KB di Kecamatan Denpasar Selatan.
 3. Intervensi pemerintah memoderasi secara semu pengaruh positif tingkat pendidikan terhadap partisipasi masyarakat dalam program KB di Kecamatan Denpasar Selatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anisa, R., & Juliannisa, I. A. (2022). Pengaruh Faktor Sosial Ekonomi Terhadap Partisipasi Dalam Program Keluarga Berencana Di Kota Bekasi. *IKRAITH-EKONOMIKA*, 5(3), 168-179.
- Apriani, A. A. R. I., & Karmini, N. L. (2021). Faktor Sosial dan Ekonomi yang Mempengaruhi Probabilitas Penggunaan Alat Kontrasepsi di Desa Kesiman Kertalangu. *E-Jurnal Ekon Pembang Univ Udayana*, 10(6), 2283-312.
- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Bali, 2023
- Fuad, I. (2018). *Dasar-dasar Kependidikan*. Rineka Cipta.
- Gerungan. (2019). *Psikologi Sosial*. PT. Refika Aditama.
- Gustika, G. S. (2013). Peningkatan Sosial Ekonomi Peserta Keluarga Berencana. *Jurnal Administrasi Pembangunan*, 11 (2),hal. 203–207.
- Handayani. (2017). *Keluarga Berencana dan Kontrasepsi*. Pustaka Sinar Harapan.
- Hanum, N., & Andiny, P. (2018). Pengaruh Tingkat Pendidikan, Usia Perkawinan Pertama dan Kematian Bayi terhadap Fertilitas di Kabupaten Aceh Timur. *Jurnal Samudra Ekonomi dan Bisnis*,50(2), hal. 15-19.
- Iswarati. (2015). *Proximate Determinant Fertilitas di Indonesia*. Puslitbang KB dan Kesehatan Reproduksi, BKKBN.
- Mankiw, N. (2006). *Pengantar Teori Ekonomi Makro* (3rd ed.). Salemba Empat.
- Mansjoer, arif. (2009). *Kapita Selekta Kedokteran* (3rd ed., Vol. 2). FK UI press.
- Marhaeni, A. (2015). Pengaruh Faktor Sosial, Ekonomi, dan Demografi Terhadap Penggunaan Kontrasepsi di Denpasar. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, 8(2), hal.155-161
- Marhaeni, A. A. I. N., & Yuliarmi, N. N. (2019). *Metode Riset Jilid 1*. Denpasar: CV. Sastra Utama.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian kuantitatif, kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta, CV.

- Sugiyono. (2017). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, CV.
- Sulistyo, B. (2014). Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Tingkat Partisipasi Pasangan Usia Subur (Pus) dalam Pelaksanaan Program Keluarga Berencana Di Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang. *Geo-Image*, 4(1).
- Sultan, S. (2018). The Effects of Education, Poverty, and Resources on Family Planning in Developing Countries. *Clinics in Mother and Child Health*, 15(1). <https://doi.org/10.4172/2090-7214.1000289>